

Saiful Chaniago: PLN Energi Gas Mengalirkan Energi untuk Masa Depan Indonesia

Updates. - KORLANTAS.ID

Aug 24, 2026 - 16:11



Saiful Chaniago Komisaris Utama PT PLN Energi Gas

OPINI - Menyalakan lampu hanya membutuhkan satu sentuhan. Namun, di balik tindakan sederhana itu terdapat rantai pasok energi yang panjang: gas harus tersedia di sumbernya, diangkut melintasi laut atau jaringan pipa, disimpan, diregasifikasi, lalu diterima pembangkit dalam volume, tekanan, mutu, dan waktu

yang tepat. Apabila satu mata rantai terputus, pembangkit dapat kehilangan bahan bakar, biaya listrik meningkat, dan masyarakat menanggung akibatnya.

Di negara kepulauan, persoalannya bukan semata-mata apakah gas tersedia, melainkan apakah gas dapat sampai ke tempat yang membutuhkan dengan harga wajar dan risiko terkendali. Di sinilah PLN Energi Gas memegang peran strategis. Perusahaan ini tidak cukup hanya menjadi pengangkut komoditas. Ia harus menjadi penghubung antara sumber gas, infrastruktur logistik, kebutuhan pembangkit, keterjangkauan listrik, dan arah transisi energi nasional.

[Profil resmi perusahaan](#) menjelaskan bahwa PT PLN Energi Gas—sebelumnya bernama PT PLN Gas & Geothermal—merupakan anak perusahaan PT PLN Energi Primer [Indonesia](#) atau PLN EPI. Perubahan nama diputuskan pada 15 September 2023 dan disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 29 September 2023. Kegiatan perusahaan berfokus pada distribusi gas melalui jaringan pipa maupun gas alam cair atau LNG, serta pengelolaan dan pendistribusian gas di darat dan laut untuk mendukung kebutuhan PLN Group.

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa mandat PLN Energi Gas berada di sektor tengah rantai pasok. Perusahaan harus mempertemukan pasokan dari hulu dengan kebutuhan pembangkit di hilir. Ibarat sistem peredaran darah, sumber gas adalah jantung dan pembangkit merupakan organ yang membutuhkan energi. Kapal, pipa, tangki, dan fasilitas regasifikasi adalah pembuluhnya. Gas yang melimpah di satu wilayah tidak banyak berarti apabila “pembuluh” menuju pusat kebutuhan tersumbat, terlalu mahal, atau tidak aman.

Tantangan ini akan semakin besar. [Proyeksi PLN EPI yang diumumkan pada Mei 2026](#) memperkirakan kebutuhan gas untuk pembangkit PLN naik sekitar 4,5 persen per tahun, dari 1.748 BBTUD pada 2026 menjadi 2.490 BBTUD pada 2034. Kebutuhan kargo LNG juga diproyeksikan meningkat dari 103 menjadi 214 kargo, sedangkan pasokan berdasarkan kontrak gas pipa diperkirakan menurun dari 757 menjadi 667 BBTUD. Angka ini merupakan proyeksi perusahaan, bukan kepastian yang bebas dari perubahan permintaan, harga, pasokan, atau kebijakan.

Data itu tetap memberi pesan jelas: kebutuhan logistik gas berpotensi meningkat justru ketika pasokan pipa menghadapi tekanan. PLN Energi Gas akan dituntut mengelola sumber yang tersebar, moda angkut yang berbeda, kapasitas penyimpanan, jadwal kapal, fasilitas penerima, serta kebutuhan pembangkit yang berubah setiap waktu. Kesalahan perencanaan dapat menghasilkan dua keadaan yang sama-sama merugikan: pembangkit kekurangan gas atau perusahaan terikat pasokan dan infrastruktur yang tidak terserap.

Contoh konkret terlihat di Tarakan. [PLN EPI menyebut adanya fasilitas penyimpanan dan regasifikasi LNG di Gunung Belah](#). Model seperti ini menunjukkan bagaimana LNG dapat menjangkau sistem kelistrikan yang tidak tersambung jaringan pipa besar dan membantu mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Bagi wilayah kepulauan, solusi dapat berbentuk klaster kecil yang menyesuaikan kebutuhan setempat, bukan selalu proyek raksasa yang mahal dan kaku.

Namun, peningkatan pemakaian gas tidak boleh dibaca sebagai izin membangun

ketergantungan fosil baru tanpa batas. [RUPTL PLN 2025–2034 yang disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 188.K/TL.03/MEM.L/2025](#) merencanakan tambahan kapasitas 69,5 gigawatt. [Kementerian ESDM merinci](#) 42,6 gigawatt atau 61 persen berasal dari energi terbarukan, 10,3 gigawatt atau 15 persen dari sistem penyimpanan energi, dan 16,6 gigawatt atau 24 persen dari pembangkit fosil. Dengan kata lain, 76 persen tambahan kapasitas diarahkan pada energi terbarukan dan penyimpanan.

Di tengah arah tersebut, gas seharusnya ditempatkan sebagai penyangga sistem: menggantikan pembangkit berbahan bakar minyak yang mahal, mengisi kebutuhan ketika pasokan surya dan angin berfluktuasi, serta menjaga keandalan saat jaringan dan penyimpanan energi belum memadai. Gas bukan tujuan akhir. Infrastruktur yang dibangun hari ini harus dinilai dari kemampuannya membantu sistem bergerak menuju energi rendah karbon, bukan dari besarnya volume gas yang dapat dijual selama mungkin.

Landasan hukumnya tegas. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik [Indonesia](#) Tahun 1945 memerintahkan agar kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (4) mengamankan perekonomian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal 28H ayat (1) juga menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain itu, [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi](#), khususnya Pasal 20, mengatur penyediaan energi melalui inventarisasi, peningkatan cadangan, penyusunan neraca, diversifikasi, konservasi, intensifikasi, serta kelancaran transmisi dan penyimpanan. Pasal yang sama mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan penyediaan energi baru dan terbarukan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional—yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014—menjadi arah kebijakan energi hingga 2060. Kerangka ini menuntut keandalan, keterjangkauan, efisiensi, dan keberlanjutan berjalan bersamaan.

Ada pihak yang menyebut gas sebagai energi bersih. Istilah itu harus digunakan secara hati-hati. Gas memang dapat menghasilkan emisi pembakaran lebih rendah daripada batu bara atau minyak dalam kondisi tertentu, tetapi gas tetap merupakan bahan bakar fosil. LNG juga membutuhkan energi untuk pencairan, pengangkutan, penyimpanan, dan regasifikasi. Di sepanjang rantai pasok terdapat risiko kebocoran metana.

[Global Methane Tracker 2026 dari International Energy Agency](#) memperkirakan kegiatan gas alam menghasilkan hampir 34 juta ton emisi metana secara global pada 2025. Lembaga itu juga menyatakan teknologi yang telah tersedia dapat mengurangi hampir 70 persen emisi metana sektor energi. Fakta ini tidak dapat langsung dipakai untuk menilai emisi PLN Energi Gas karena dibutuhkan pengukuran khusus pada fasilitas perusahaan. Namun, temuan tersebut menegaskan bahwa klaim lingkungan harus dibuktikan melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi—bukan sekadar perbandingan umum dengan bahan bakar lain.

Kritik lain menyatakan bahwa pembangunan terminal LNG, kapal, pipa, dan

pembangkit gas berisiko mengunci sistem pada aset fosil selama puluhan tahun. Kritik ini masuk akal. Kontrak jangka panjang dengan kewajiban pembayaran minimum dapat membebani sistem apabila pertumbuhan permintaan meleset atau energi terbarukan berkembang lebih cepat. Karena itu, investasi gas harus modular, berdasarkan kebutuhan nyata, mempunyai skenario pemanfaatan yang transparan, serta tidak menghambat masuknya energi bersih.

Sebaliknya, pendapat bahwa seluruh gas dapat segera digantikan energi terbarukan juga belum memperhitungkan kondisi setiap sistem kelistrikan. Surya dan angin bersifat berubah-ubah, sedangkan jaringan antarpulau, penyimpanan energi, dan pengendalian beban belum merata. Mematikan satu sumber sebelum penggantinya siap dapat meningkatkan risiko gangguan listrik atau menghidupkan kembali pembangkit diesel. Sikap yang rasional bukan mempertentangkan gas dan energi terbarukan secara hitam-putih, melainkan menetapkan fungsi gas secara terbatas, terukur, dan terus mengecil sejalan dengan penguatan jaringan, penyimpanan, serta pembangkit bersih.

Atas dasar itu, PLN Energi Gas perlu menjalankan beberapa pembenahan strategis. Pertama, perusahaan harus menyusun perencanaan pasokan terpadu berdasarkan kebutuhan pembangkit per jam, musim, dan wilayah. Gas pipa perlu diprioritaskan ketika ekonomis dan tersedia, sedangkan LNG atau moda lain digunakan untuk wilayah yang secara geografis tidak layak dilayani pipa. Penilaian harus memakai biaya sepanjang umur proyek, termasuk harga bahan bakar, biaya angkut, kehilangan gas, risiko kurs, cadangan kapasitas, dan biaya lingkungan.

Kedua, kontrak pasokan dan transportasi harus memiliki keluwesan volume serta formula harga yang melindungi kepentingan publik. Prioritas pada sumber domestik penting untuk ketahanan energi, tetapi tidak boleh menghilangkan disiplin harga, mutu, dan keandalan. Informasi mengenai dasar kebutuhan, masa kontrak, risiko kewajiban pembayaran, dan kinerja pemasok perlu diawasi secara kuat tanpa membuka rahasia komersial yang sah.

Ketiga, pengendalian metana harus menjadi indikator utama. PLN Energi Gas perlu menerapkan program deteksi dan perbaikan kebocoran secara berkala, pemantauan pada sambungan pipa, katup, tangki, kapal, dan fasilitas regasifikasi, serta target pengurangan pelepasan dan pembakaran gas. Intensitas emisi per satuan energi yang dikirim sebaiknya diumumkan dalam laporan keberlanjutan dan diverifikasi pihak independen. Gas yang bocor bukan hanya merusak iklim, tetapi juga berarti energi dan uang yang hilang.

Keempat, pembangunan infrastruktur harus diselaraskan dengan peta jalan energi terbarukan. Terminal dan fasilitas baru harus bersifat modular, tidak berlebihan, dan mempunyai kajian mengenai masa manfaat serta risiko aset terbengkalai. Gagasan penggunaan infrastruktur untuk biometana atau hidrogen pada masa depan hanya boleh disampaikan setelah kesesuaian material, keselamatan, biaya, dan pasokannya diuji secara teknis. Janji konversi yang belum terbukti tidak boleh menjadi alasan membenarkan investasi yang tidak efisien.

Kelima, keberhasilan perusahaan harus diukur dari manfaat publik. Indikatornya antara lain penurunan pemakaian bahan bakar minyak, berkurangnya gangguan

akibat kekurangan bahan bakar, biaya gas sampai pembangkit, penurunan emisi, keselamatan operasi, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja dan usaha lokal. Banyaknya kargo atau panjangnya pipa hanyalah keluaran. Hasil akhirnya adalah listrik yang andal, terjangkau, dan makin bersih.

Terakhir, tata kelola harus menjadi pagar utama. Pengadaan kapal, pembangunan terminal, penunjukan mitra, serta kontrak pasokan membawa nilai dan risiko besar. Audit berbasis risiko, pencegahan benturan kepentingan, kanal pelaporan pelanggaran yang terlindungi, dan pengawasan komisaris maupun pemegang saham harus bekerja nyata. Dalam bisnis energi, ketidaktransparanan hari ini dapat berubah menjadi beban tarif atau subsidi yang dibayar masyarakat bertahun-tahun kemudian.

Menurut pendapat penulis, masa depan PLN Energi Gas tidak ditentukan oleh seberapa banyak gas yang dialirkan, melainkan oleh seberapa cerdas perusahaan mengelola perannya di tengah perubahan sistem energi. Perusahaan harus mampu menjaga listrik tetap menyala hari ini tanpa menutup jalan bagi energi bersih esok hari.

Gas dapat menjadi jembatan yang berguna, tetapi jembatan selalu memiliki arah dan ujung. Apabila dibangun tanpa batas waktu, ia berubah menjadi tempat berhenti. PLN Energi Gas harus memastikan setiap pipa, kapal, tangki, dan terminal menjadi alat untuk memperkuat ketahanan energi, menurunkan biaya serta emisi, dan mempercepat perjalanan menuju masa depan [Indonesia](#) yang mandiri, adil, dan berkelanjutan.

Excerpt: PLN Energi Gas harus memasok gas secara andal, efisien, rendah emisi, dan tetap mengarahkan sistem menuju energi terbarukan.

Jakarta, 24 Agustus 2026

Saiful Chaniago
Komisaris Utama
PT PLN Energi Gas